

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Partisipasi politik mempunyai fungsi dan peran dalam mendidik masyarakat untuk memahami kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut kehidupan mereka. Hal ini pun relevan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang *pertama*, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. *Ketiga*, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.¹

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Salah satu bentuk perhatian masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mengikuti segala proses yang telah dibuat oleh pemegang kebijakan otonomi daerah diantaranya Pemilihan Kepala Daerah yang dalam penentuannya secara langsung dipilih oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan salah satu sarana Pendidikan politik bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya demokrasi yang baik dan mendalam. Seperti daerah di Indonesia pada umumnya, Kabupaten Kuningan merupakan salah satu Kabupaten yang beragam dalam tingkat partisipasinya, ada yang rendah, biasa, dan tinggi. Adapula yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, budaya, latar belakang pendidikan, organisasi yang sehingga turut meramaikan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah ini.

Desa adalah kesatuan masyarakat yang terkecil dalam sistem pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengontrol dalam berjalannya roda kehidupan bermasyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten. Dengan kata lain, dikatakan suatu desa jika didalamnya terdapat individu-individu yang terikat dalam suatu wilayah tertentu dan melangsungkan hidup bersama.²

Mengingat partisipasi politik sangat penting maka akan dilakukan sebuah penelitian tentang bagaimana partisipasi politik yang berlangsung pada suatu wilayah khususnya di Desa Silebu. Peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan

² Nasrullah Adon, *Sosiologi Pedesaan*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2015. Hlm 4.

melakukan penelitian yang merupakan sebuah wilayah dengan masyarakat terbanyak di Kecamatan Pancalang. Dari segi profesi masyarakat Desa Silebu yang agraris dan cukup beragam, mulai dari petani, kusir, pedagang, tenaga pengajar hingga perantauan. Kehidupan masyarakat yang secara ekonomi menengah kebawah dengan mata pencaharian sebagai buruh tani, buruh perkebunan, dan pedagang dimanfaatkan oleh para aktifis politik yang melihat secara finansial dan besarnya pengaruh mereka dimasyarakat yang dijadikan sebagai upaya dalam menggiring masyarakat dalam keikutsertaan berpolitik.

Selain itu, adanya partisipan dan akademisi di dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu faktor bagaimana partipasi masyarakat dalam berpolitik itu berlangsung. Hal ini dikarenakan mereka sedikit banyaknya lebih mengetahui dari apa yang mereka lakukan. Artinya, ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengambil bagian dari partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program. Disisi lain, tidak sedikit masyarakat di Desa Silebu ini dapat dikatakan apolitis dalam wilayah-wilayah tertentu, khususnya Pemilihan Kepala Daerah. Masyarakat memaknai politik sebagai suatu hal yang kotor dan penuh kebohongan. Masyarakat menganggap bahwa politik tidak membantu mereka dalam mensejahterakan mereka, tetap saja kebutuhan-kebutuhan rumah tangga semakin naik, dan hasil daripada usaha mereka tidak terlalu mencukupi. Maka diharapkan Partai politik beserta elit yang ada harus berjuang dengan memberikan pendidikan politik kepada pemilih sehingga rendahnya partipasi masyarakat masyarakat bisa terobati. Jangan hanya ketika masyarakat apolitis lalu

malah kebingungan dan tidak berbuat apa-apa, bersinergi dengan para akademisi untuk membuat kajian-kajian ilmiah bisa menjadi salah satu solusi.

Dilihat bahwa partisipasi masyarakat Desa Silebu tahun 2014 dari pemilihan tetap berjumlah 1.537 jiwa. Yang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan di Desa Silebu mencapai 1.499 jiwa dan yang tidak memilih hanya mencapai 38 jiwa saja, hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah cukup tinggi.³ Namun fakta yang ditemukan oleh peneliti dilapangan bahwa minat untuk mengetahui terkait dengan kesadaran masyarakat dalam politik masih tergolong rendah, hal tersebut disebabkan dengan berbagai aktivitas dan kesibukan yang dilakukan masyarakat setiap hari, dilihat dari ditemukannya *money politic*, mana calon yang menghasilkan uang lebih banyak, maka itulah yang dipilih. Dan jika tidak ada calon yang memberikan uang, mereka lebih memilih untuk memberikan pilihannya secara asal-asalan, karena dianggap kurang memberikan keuntungan bagi masyarakat yang akan memilih.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa belum adanya peningkatan partisipasi masyarakat yang signifikan khususnya Desa Silebu. Kondisi inilah yang menyebabkan peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan 2018”.

³ Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara KPU Kabupaten Kuningan Tahun 2014

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pendidikan politik dimasyarakat Desa Silebu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan. Hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang menilai bahwa yang berkaitan dengan politik tidak terlalu mempengaruhi kesejahteraan mereka. Dengan demikian masyarakat enggan untuk mempelajari atau mencari wawasan terkait dengan pentingnya politik.
2. Masyarakat Desa Silebu merupakan salah satu desa yang konsumtif dalam dinamika politik. Dengan jumlah 1783 jiwa yang mempunyai hak pilih dan jumlah pemilih terbanyak di Kecamatan Pancalang, beragam informasi yang masuk terkait dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah. Namun ternyata tidak sedikit dari mereka yang menangkap informasi secara langsung, sehingga dalam penyampaian informasipun beragam.
3. Masyarakat Desa Silebu mempunyai orientasi cukup baik dalam partisipasi politik. Hal ini dilihat dari partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2014 kemarin. Namun yang menarik bagi peneliti adalah pada faktanya ditemukan masih banyak masyarakat yang minim wawasan akan pentingnya keikutsertaan dalam kegiatan politik, dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penelitian ini maka perlu diadakan pembatasan penelitian melalui rumusan masalah, adapun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana aktivitas masyarakat Desa Silebu mengenai Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana realitas partisipasi politik masyarakat Desa Silebu dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Silebu dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui realitas partisipasi politik masyarakat Desa Silebu dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan
2. Untuk mengetahui aktivitas masyarakat Desa Silebu mengenai Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan
3. Untuk mengetahui upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Silebu dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menggali dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Silebu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Tahun 2018, sehingga kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi akan terlaksana dengan baik dan selaras. Selain itu, diharapkan masyarakat Desa Silebu memiliki tingkat kepedulian dan partisipasi yang tinggi terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai partisipasi politik masyarakat yang ada di lingkungan Desa Silebu dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Bagi Kampus sendiri diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam proses pembelajaran dan informasi kepada mahasiswa mengenai proses partisipasi politik yang terjadi di masyarakat Desa Silebu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.⁴ Makhluk hidup bersifat sosial apabila para anggotanya berinteraksi, bersosialisasi dan mempunyai ketergantungan satu sama lain untuk menjalankan

⁴ Nasrullah Adon, *Sosiologi Pedesaan*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2015. Hlm 4.

roda kehidupannya. Manusia dikatakan makhluk sosial karena mereka hidup bersama dalam berbagai macam kelompok terorganisir yang kita sebut masyarakat. Meski disisi lain banyak sekali spesies makhluk hidup yang sama dalam polanya, namun kehidupan sosial merupakan gejala yang sangat umum terjadi dalam kehidupan makhluk hidup.

Demokrasi merupakan suatu sistem yang didambakan oleh hampir setiap insan politik. Ini bisa dilihat sejak dari zaman Yunani Kuno pada 6 sampai dengan 3 SM. Sistem yang diterapkan pada saat itu yakni demokrasi secara langsung dengan suatu majelis yang terdiri atas 5000 sampai 6000 orang. Barulah pada abad 19, muncul dalam wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik berdasarkan kemerdekaan azas individu, yang dimana negara bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat dengan salah satu caranya yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan warga negaranya.⁵

Politik membahas secara rasional berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Politik berarti pula proses dengan mana kelompok-kelompok membuat keputusan-keputusan kolektif. Menurut Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.⁶ Interaksi antara pemerintah dan masyarakat diantara lembaga-lembaga pemerintah dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik, pada dasarnya merupakan perilaku politik. Partisipasi politik tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan

⁵ Basrowi dkk, *Sosiologi Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 123.

⁶ Handoyo, *Sosiologi Politik*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hlm. 68-69.

politik secara langsung. Misalnya, pencalonan diri dalam pemilihan umum, diskusi masalah umum, dan ikut dalam kampanye politik. Kegiatan-kegiatan politik tak langsung juga dapat menjadi sarana partisipasi politik, misalnya dengan membaca koran-koran politik untuk mengenali dan menyikapi persoalan-persoalan publik atau turut bergabung sebagai anggota lembaga-lembaga sukarela

.⁷

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

⁷ Handoyo, Sosiologi Politik, Yogyakarta: Ombak, 2013, hlm. 249.

Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Coleman selanjutnya menyinggung masalah adanya aktor yang memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman. Yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial. Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan. Terlibat dalam sistem tindakan, selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka.

Orientasi besarnya pilihan rasional Coleman memiliki ide dasar bahwa “orang-orang bertindak secara sengaja kearah suatu tujuan, dengan tujuan itu dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan. Para aktor akan melakukan tindakan-tindakan dalam rangka memaksimalkan manfaat, keuntungan serta pemuasan pada kebutuhan-kebutuhan mereka. Oleh karena itu ada dua unsur yang harus ada dalam teori ini yaitu aktor dan sumber daya, tentu sumber daya yang dimaksud

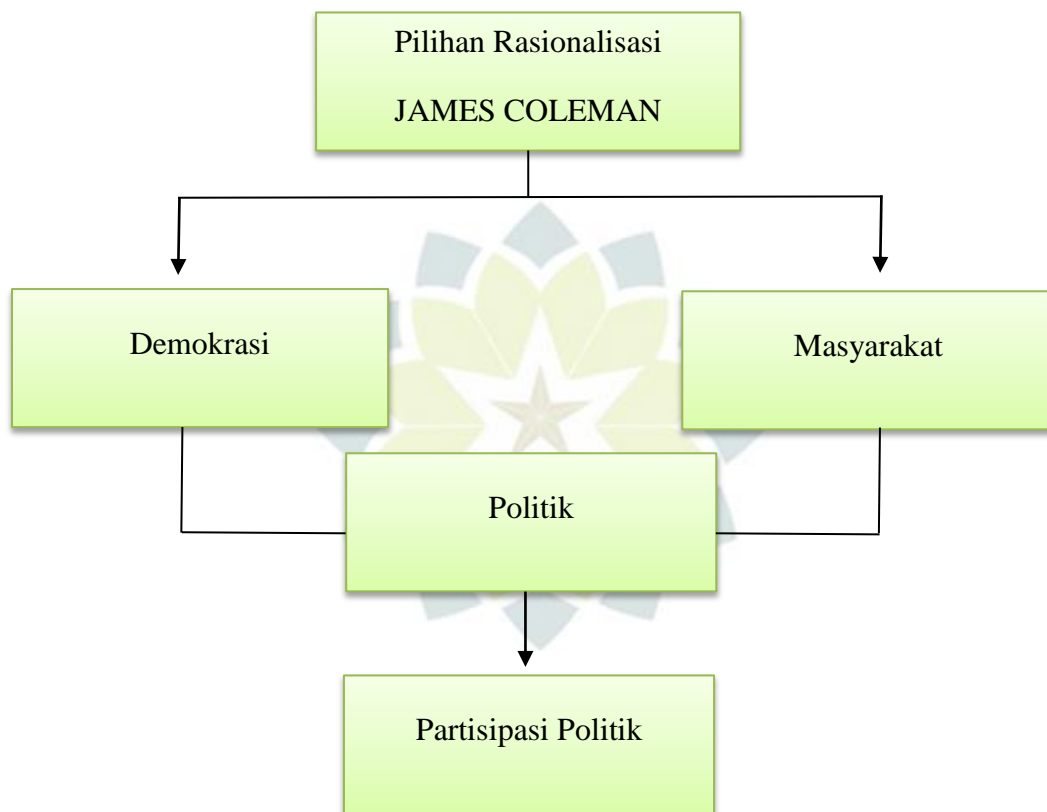
dapat dikontrol oleh sang aktor. Coleman merinci bagaimana interaksi mereka mendorong pada level sistem, ini tentu menghubungkan isu mikro-makro.⁸

Teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James Coleman bermula pada pemikiran bahwa dunia sosial ini terbentuk oleh hasil putusan-putusan rasional para aktor dalam rangka memaksimalkan kepuasannya atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Suatu norma sosial terbentuk dan dipertahankan dalam oleh masyarakat karena adanya kesadaran akan manfaat yang didapatkan dari pengalaman terhadap norma tersebut dan kerugian bersama yang akan didapatkan apabila norma tersebut dilanggar. Perilaku kolektif sendiri muncul akibat adanya pemindahan kontrol secara sepihak atas tindakan seorang aktor kepada orang lain.



⁸ Ritzer George, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm.709.

Gambar 1.1
Skema Konseptual



Partisipasi menjadi kunci demokrasi yang dibuktikan dengan semua kegiatan membutuhkan partisipasi, hal ini tentu dengan berbagai landasan seseorang terlibat aktif dalam tiga unsur, yaitu; (1) adanya penyertaan pikiran dan perasaan, (2) adanya motivasi untuk kontribusi, serta (3) adanya tanggungjawab bersama. Partisipasi berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil.

Bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi:

1. Partisipasi dalam bentuk iuran uang, sarana atau prasarana
2. Partisipasi dalam bentuk fisik atau tatap muka
3. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
4. Partisipasi dalam bentuk dukungan masyarakat tersebut.

Selain itu juga ada beberapa jenis partisipasi politik, yaitu:

1. Partisipasi pikiran (*psychological participation*)
2. Partisipasi tenaga (*psychal participation*)
3. Partisipasi pikiran dan tenaga (*psychological and psychal participation*)
4. Partisipasi keahlian (*participation with skill*)
5. Partisipasi barang (*material participation*)
6. Partisipasi uang/dana (*money participation*)